

## MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KEMUNGKINAN KECURANGAN DALAM PELAPORAN KEUANGAN

Gregorius Satrio Wicaksono, Anis Chariri<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

### ABSTRACT

*This study aims to obtain empirical evidence and to analyze the effect of corporate governance's mechanism such as board size of commissioners, board composition of independent commissioners, audit committee, and internal audit effectiveness on likelihood of fraudulent financial reporting. Company size and leverage used as control variables in this study.*

*The population in this study was non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2008 to 2012. Total sample used in this study was 38 companies, consist of 19 companies which did fraudulent financial reporting, and 19 companies which didn't fraudulent financial reporting as matched companies by the criteria on the same of industry and total asset. Data analysis was performed with the descriptive statistic analysis, multikolonieritas test, and hypothesis test with logistic regression analysis.*

*The results of analysis this study indicate that audit committee and internal audit effectiveness in a significant negative effect on likelihood of fraudulent financial reporting, while board size of commissioners and board composition of independent commissioners have no significant effect on likelihood of fraudulent financial reporting.*

*Keywords: fraudulent financial reporting, corporate governance, internal audit, agency theory*

### PENDAHULUAN

Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib mempublikasikan laporan keuangan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap para pemakai laporan keuangan. Dalam PSAK no. 1, laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan dapat menjadi tolak ukur bagi pihak internal maupun eksternal untuk menilai kinerja dari suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat juga dijadikan sebagai pedoman bagi pemakai laporan keuangan eksternal perusahaan seperti investor, sebagai dasar pengambilan keputusan (Ghozali dan Chariri, 2007). Adanya penilaian kinerja tersebut mendorong pihak manajemen menjalankan aktivitas operasional perusahaan secara maksimal, sehingga dapat memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat. Namun, usaha yang dilakukan pihak manajemen cenderung mengarah pada tindakan kecurangan dalam pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*). Hal ini menyebabkan informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan bagi para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan (Perols dan Barbara, 2011).

Kecurangan pelaporan keuangan merupakan penyajian dan pengungkapan secara sengaja yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk mencurangi para pemakai laporan keuangan. Meningkatnya kecurangan pelaporan keuangan di perusahaan-perusahaan publik, telah meningkatkan pula kekhawatiran para pemakai laporan keuangan seperti auditor, investor, kreditor dan pengguna lainnya. Runtuhnya perusahaan-perusahaan internasional seperti World Com., Enron, dan Global Crossing karena insiden kecurangan pelaporan keuangan, telah mengikis

---

<sup>1</sup> Corresponding author

---

kepercayaan terhadap pasar keuangan, informasi keuangan, dan juga profesi akuntansi seluruh dunia (Law, 2011).

Melihat peristiwa yang telah terjadi, penelitian mengenai kecurangan pelaporan keuangan menarik untuk diteliti. Di era modernisasi ini, negara-negara di dunia perlu menerapkan suatu sistem yang harus dikelola dengan baik, yang sering disebut pula dengan *Good Corporate Governance*. Menurut Khairandy dan Malik (2007), *corporate governance* mengacu pada suatu prosedur yang dibuat dalam perusahaan yang memberikan tentang fakta-fakta material keadaan investor dan *stakeholder* lain dan membuat keputusan yang efisien dan akurat dalam perusahaan. Oleh karena itu, *good corporate governance* sangat diperlukan untuk mencegah dan menghalangi manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komite audit dan efektivitas audit internal terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

Every company that listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) is obliged to publish financial statements to the public as a form of corporate responsibility to the users of financial statements. In SFAS no. 1, financial statements are a structured representation of the financial position and financial performance of an entity. General purpose of financial statements is providing information about the financial position, performance and cash flow of companies that give benefit the majority users of economic reports and to show the management responsibility for the use of resources that entrusted to them.

Financial statements can be a measurement for internal and external users to assess the company's performance. Financial statements can also be used as a guideline for external users of financial statements such as investors, as the basis for decision making (Ghozali and Chariri, 2007). The existence of the performance assessment is encouraging the management to run the company's operational activities to the maximum, so they can provide the information to stakeholders that the company is in a healthy condition. However, the effort management is likely to the act of fraudulent financial reporting. This causes the information in the financial statements become irrelevant to stakeholders as a basis for decision making (Perols and Barbara, 2011).

Fraudulent financial reporting is a presentation and disclosure intentionally made by management with the purpose to deceive financial statement users. Increasing fraudulent financial reporting in public companies have increased the concerns of the users of financial statements such as auditors, investors, creditors, and other users. The collapse of international companies such as WorldCom, Enron and Global Crossing because of the accident of fraudulent financial reporting, have decreased confidence in the financial market, financial information, and the accounting profession worldwide (Law, 2011).

Seeing what had happened, the research of fraudulent financial reporting is interesting to be study. In this era of modernization, the countries in the world need to implement a system that must be managed properly, which is often also referred to the Good Corporate Governance. According Khairandy and Malik (2007), corporate governance refers to a procedure created in companies that provide on-state material facts investors and other stakeholders and make decisions efficiently and accurately within the company. Therefore, good corporate governance is indispensable to prevent and deter managers commit fraud in financial reporting.

This study aims to analyze the effect of corporate governance mechanism which consists of board size of commissioners, board composition of independent commissioners, audit committee, and internal audit effectiveness on likelihood of fraudulent financial reporting.

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Teori keagenan merupakan dasar pemikiran dalam memahami konsep *corporate governance*. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu lebih mengutamakan kepentingannya sendiri karena pada dasarnya sifat manusia sebagai makhluk

individu sehingga menyebabkan konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa hubungan antara investor dan manajer yang seperti ini dapat menyebabkan suatu kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*). Kondisi ini terjadi karena manajer memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan informasi yang diterima oleh investor sehingga hal itu akan mendorong perilaku manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi dari investor. Dalam kondisi ketidakseimbangan informasi tersebut, manajer berkesempatan untuk melakukan kecurangan (*fraud*) dengan memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan yang disajikan kepada investor (Richardson, 1998).

Widowati (2009) menjelaskan bahwa teori keagenan yang berkaitan dengan *corporate governance* dapat dijadikan alat manajer (*agent*) untuk meyakinkan investor (*principal*) dalam memastikan penerimaan *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* diharapkan mampu mengatasi konflik kepentingan dan ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan *agent* untuk mencegah dan menghalangi terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

### **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan**

Dalam teori agensi, Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan tujuan yang saling bertentangan antara *agent* dengan *principal*. Pendelegasian tugas dari *principal* kepada *agent* membuat *principal* tidak dapat mengawasi kinerja manajer secara menyeluruh, sehingga tercipta suatu kondisi asimetri informasi yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud*.

Oleh karena itu, dewan komisaris dibentuk untuk ditugaskan dan diberi tanggung jawab pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007). Tugas pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *corporate governance* dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam implementasi *good corporate governance*. Dalam konteks informasi keuangan, mereka bertanggung jawab atas transparansi dan kredibilitas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Fama dan Jensen (1983) yang menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan karena mereka memiliki tingkat pengendalian tertinggi dalam suatu organisasi.

Vafeas (2005) berpendapat bahwa ukuran dewan terlalu kecil dan terlalu besar tidak efektif. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa tanggung jawab kurang diambil oleh ukuran dewan yang besar dan terlalu banyak kewajiban untuk ukuran dewan yang kecil. Hasil penelitian Nasution dan Setyawan (2007) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Abbot, Taman dan Parker, (2000) dalam Razali dan Arshad (2014) menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran dewan dan pemantauan kualitas pelaporan keuangan sehingga dapat mencegah kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

*H<sub>1</sub>: Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.*

### **Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan**

Secara umum, dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris dan merupakan individu-individu di luar organisasi. Komposisi minimum dewan komisaris independen adalah 30% dari keanggotaan dewan komisaris. Menurut Siladi (2006), meskipun pada kenyataannya dewan komisaris independen tidak terlibat dalam kegiatan operasi sehari-hari, namun mereka masih perlu bekerja sama dengan dewan direksi untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang perusahaan. Sebagai dewan komisaris independen, mereka tidak mengalami tekanan oleh organisasi internal perusahaan meskipun tidak terlibat dalam kegiatan operasi sehari-harinya. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung untuk bertindak secara independen dan sebagai pemisah kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Penelitian yang dilakukan oleh Chtourou (2001), Nasution dan Setiawan (2007), serta Razali dan Arshad (2014) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya dewan komisaris independen, maka dapat menjamin transparansi laporan keuangan sehingga pemegang saham mendapatkan informasi yang berkualitas. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

*H<sub>2</sub>: Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.*

### **Pengaruh Komite Audit terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan**

Teori agensi menjelaskan bahwa setiap individu lebih mengutamakan kepentingannya sendiri karena pada dasarnya sifat manusia sebagai makhluk individu sehingga menyebabkan konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan permasalahan yang sering disebut dengan *agency problem* (Jensen dan Meckling, 1976). Penerapan mekanisme *corporate governance*, yang salah satunya adalah komite audit, merupakan salah satu cara untuk mengatasi terjadinya *agency problem*. Dengan adanya komite audit diharapkan tidak terjadi *fraud* dan menyeimbangkan informasi yang diperoleh *principal* dan *agent*.

Menurut Kep. 29/PM/2004, komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam melakukan pengawasan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan. Tugas komite audit membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen dalam upaya meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Komite audit mempunyai tanggung jawab utama yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, pengawasan internal, menelaah sistem pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Bapepam (2004) mensyaratkan komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh dewan komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Selain itu, Bapepam juga menghimbau bahwa setidaknya komite audit melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun atau kuartalan. Oleh karena itu, semakin sering komite audit melakukan rapat, maka akan semakin baik komunikasi yang terjalin antar anggota komite audit dalam melakukan fungsi pengawasannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Chtourou (2001) dan Skousen *et al.* (2009) menemukan bahwa komite audit berhubungan negatif dengan terjadinya kecurangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komite audit dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

*H<sub>3</sub>: Komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.*

### **Pengaruh Efektivitas Audit Internal terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan**

Audit internal memiliki peran penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa (Hery, 2010). Menurut Belay (2007), fungsi audit internal merupakan salah satu mekanisme yang paling kuat dalam pemantauan dan mempromosikan sistem pemerintahan yang baik dalam suatu organisasi.

Audit internal bertanggung jawab membantu manajemen dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya *fraud* dengan melakukan pengujian keandalan dan efektivitas dari pengendalian dalam berbagai segmen di suatu perusahaan. Namun, audit internal juga harus mendapat sumber daya yang memadai dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2005) dan Archambeault (2002) dalam Razali dan Arshad (2014) menemukan bahwa audit internal akan memberikan keuntungan tambahan bagi suatu perusahaan karena auditor internal sudah memiliki pengetahuan tentang perusahaan tersebut. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi gejala *fraud* setiap kali ada potensi

terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

*H<sub>4</sub>: Efektivitas audit internal berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.*

## METODE PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Variabel kecurangan dalam pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yang dikategorikan menjadi dua, yaitu kode 1 (satu) untuk perusahaan-perusahaan yang terbukti telah melakukan kecurangan (*fraud*) karena melakukan sejumlah pelanggaran terhadap peraturan Bapepam yang mengandung unsur *fraud* serta terkena sanksi, dan kode 0 (nol) untuk perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan kecurangan (*non fraud*). Variabel ukuran dewan komisaris diukur dengan jumlah total anggota dewan komisaris, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Variabel komposisi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan persentase dewan komisaris dari luar perusahaan terhadap total jumlah dewan komisaris. Variabel komite audit diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit yang terdapat pada perusahaan dalam satu tahun. Variabel efektivitas audit internal diukur dengan memberi kode 1 jika audit internal dalam laporan keuangan diungkapkan, kode 2 jika diungkapkan namun tidak lengkap, kode 3 jika tidak diungkapkan.

Namun karena ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhi terjadinya *fraud* seperti ukuran perusahaan (*size*) dan *leverage*, maka kedua faktor tersebut akan dijadikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan nilai log total aset perusahaan pada akhir tahun. Variabel *leverage* diukur dengan menggunakan rasio total hutang terhadap total aset.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 - 2012. Perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan sengaja tidak dimasukkan ke dalam sampel karena regulasi penyajian laporan keuangannya berbeda dengan sektor non keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Perbedaan tersebut dapat menjadi faktor yang menyebabkan hasil penelitian tidak *valid*.

Sedangkan sampel yang merupakan bagian dari populasi diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, diharapkan mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel untuk penelitian adalah:

1. Perusahaan sampel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang non keuangan yang terdaftar di BEI dalam periode tahun 2008 - 2012.
2. Untuk perusahaan yang dikategorikan *fraud* menggunakan data laporan dari OJK dengan kategori peringatan VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, yaitu perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan Bapepam, serta terkena sanksi dan pelanggaran tersebut mengandung unsur *fraud*.
3. Perusahaan yang dikategorikan *non fraud* yang dijadikan perusahaan kontrol harus memiliki kesamaan pada industri, jumlah aset, dan tanggal tutup buku pada tahun *fraud*.
4. Perusahaan memiliki komite audit serta melaporkan karakteristik pertemuan komite audit pada tahun *fraud* dan memiliki data yang lengkap pada tahun 2008 - 2012.

### Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi logistik sebagai berikut:

$$\text{FRAUD} = \alpha + \beta_1 \text{COM} + \beta_2 \text{COMINDEP} + \beta_3 \text{ACMEET} + \beta_4 \text{IA} + \beta_5 \text{SIZE} + \beta_6 \text{LEV} + \epsilon$$

Keterangan:

FRAUD : variabel *dummy*, kode 1 (satu) untuk perusahaan yang melakukan kecurangan (*fraud*) laporan keuangan, kode 0 (nol) untuk perusahaan *non fraud*

$\alpha$  : konstanta  
 $\beta$  : koefisien variabel  
 COM : ukuran dewan komisaris  
 COMINDEP : dewan komisaris independen  
 ACMEET : komite audit  
 IA : efektivitas audit internal  
 SIZE : ukuran perusahaan  
 LEV : *leverage*  
 $\epsilon$  : koefisien *error*

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Sampel Penelitian

Pengambilan sampel didasarkan pada laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kategori peringatan VIII.G.7. tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan memiliki komite audit serta melaporkan karakteristik pertemuan komite audit pada tahun *fraud*. Dalam hal ini diperoleh sebanyak 19 perusahaan yang melakukan kecurangan (*fraud*) dalam pelaporan keuangan selama tahun 2008 hingga 2012. Selanjutnya, penelitian ini mengambil data perusahaan *non fraud* yang masih satu sektor dengan perusahaan *fraud* sebagai perusahaan kontrol atas perusahaan *fraud* dengan kriteria pada kesamaan dalam industri dan jumlah asetnya. Perincian jumlah sampel dapat dilihat dari tabel 1.

**Tabel 1**  
Sampel Berdasarkan Tahun

Tahun	Perusahaan Curang	Perusahaan Tidak Curang
2008	7	7
2009	5	5
2010	4	4
2011	1	1
2012	2	2
Total	19	19

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pula berdasarkan jenis industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

**Tabel 2**  
Sampel Berdasarkan Jenis Industri

No	Jenis Industri	Perusahaan Curang	Perusahaan Tidak Curang
1.	<i>Agriculture</i>	-	-
2.	<i>Mining</i>	7	7
3.	<i>Basic Industry and Chemicals</i>	3	3
4.	<i>Miscellaneous Industry</i>	1	1
5.	<i>Consumer Goods Industry</i>	-	-
6.	<i>Property, Real Estate and Building Construction</i>	4	4
7.	<i>Infrastructure, Utilities and Transport</i>	1	1
8.	<i>Trade, Services and Investment</i>	3	3
	TOTAL	19	19

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan dari tabel 2, perusahaan yang melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan lebih banyak terjadi pada jenis industri *Mining*, yaitu sebanyak 7 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan lebih sedikit terjadi pada jenis

industri *Miscellaneous Industry* dan *Infrastructure, Utilities and Transport*, yaitu sebanyak 1 perusahaan.

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	Fraud		Non Fraud	
	Mean	Std. Dev.	Mean	Std. Dev.
COM	3.4211	1.12130	4,3158	1,88717
COMINDEP	.4219	.08354	.3697	.06044
ACMEET	4.8947	4.25434	10.4737	10.16731
IA	2.3684	.68399	2.8421	.37463
SIZE	27.7700	1.50795	27.8916	1.22085
LEV	.4942	.28742	.4959	.18440

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan dari tabel 3, rata-rata jumlah anggota dewan komisaris perusahaan *fraud* sebesar 3,4211 dan perusahaan *non fraud* sebesar 4,3158. Hal ini berarti jumlah anggota dewan komisaris dari perusahaan sampel rata-rata sebanyak 4 orang. Sedangkan rata-rata komposisi dewan komisaris independen perusahaan *fraud* sebesar 0,4219 atau 42,19% dan perusahaan *non fraud* sebesar 0,3697 atau 36,97%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tersebut sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bappepam mengenai komposisi komisaris independen yaitu sebesar 30% dari jumlah dewan komisaris. Untuk rata-rata pertemuan komite audit antara kelompok perusahaan *fraud* dengan perusahaan *non fraud* menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan *fraud* memiliki rata-rata pertemuan komite audit sebanyak 4,8949 lebih sedikit dibanding perusahaan *non fraud* yaitu sebanyak 10,4737 kali. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tersebut sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bappepam mengenai pertemuan komite audit yaitu sebanyak 4 kali. Jika dilihat dari efektivitas audit internal antara kelompok perusahaan *fraud* dengan perusahaan *non fraud* menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan *fraud* memiliki rata-rata pengungkapan audit internal sebanyak 2,37 lebih sering dibanding perusahaan *non fraud* sebanyak 2,84. Hal ini berarti bahwa masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan audit internal.

Tabel 3 juga menunjukkan rata-rata variabel kontrol ukuran perusahaan (*size*) dan *leverage* antara perusahaan *fraud* dengan perusahaan *non fraud*. Jika dibandingkan antara ukuran perusahaan yang melakukan *fraud* dengan perusahaan *non fraud* menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan *fraud* memiliki ln total aset sebesar 27,7700 tidak jauh berbeda dengan perusahaan *non fraud* yaitu sebesar 27,8916. Sedangkan rata-rata *leverage* antara kelompok perusahaan yang melakukan *fraud* dengan perusahaan *non fraud* menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan *fraud* memiliki *leverage* sebesar 0,4942 tidak jauh berbeda pula dengan perusahaan *non fraud* yaitu sebesar 0,4959.

### Pembahasan Hasil

Hasil pengujian kelayakan model regresi (*goodness of fit test*) dengan menggunakan *Hosmer and Lameshow Goodness of Fit Test* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,164. Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka artinya tidak diperoleh adanya perbedaan antara data estimasi model regresi logistik dengan data observasinya. Hal ini berarti bahwa model tersebut sudah tepat dengan tidak perlu adanya modifikasi model. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	Nilai Signifikansi ( $\alpha = 5\%$ )
Ukuran Dewan Komisaris (COM)	,222
Komposisi Dewan Komisaris Independen (COMINDEP)	,130
Komite Audit (ACMEET)	,028*
Efektivitas Audit Internal (IA)	,032*
Ukuran Perusahaan (SIZE)	,080
Leverage (LEV)	,117

Keterangan: \*) Signifikan

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kemungkinan melakukan *fraud* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,222. Hasil tersebut artinya ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga hipotesis 1 ditolak. Dengan jumlah anggota dewan komisaris yang semakin banyak, tidak secara efektif dapat melakukan pengawasan terhadap dewan direksi dan tidak dapat meningkatkan kinerja manajemen suatu perusahaan dalam pencegahan *fraud*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa berapapun jumlah dewan komisaris yang terdapat dalam suatu perusahaan tidak dapat mencegah kecurangan dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhou dan Chen (2004) dalam Nasution dan Setyawan (2007) serta Razali dan Arshad (2014).

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap kemungkinan melakukan *fraud* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,130. Hasil tersebut artinya dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga hipotesis 2 ditolak. Hal ini disebabkan karena dewan komisaris independen tidak berhubungan langsung dengan perusahaan yang mereka tangani, sehingga menyebabkan kualitas fungsi pengawasan dalam perusahaan sulit ditingkatkan yang berdampak pada terjadinya *fraud*. Selain itu, pembentukan dewan komisaris independen yang dilakukan oleh perusahaan hanya untuk memenuhi regulasi saja, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota komisaris, tetapi pembentukan tersebut tidak untuk menegakkan *good corporate governance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Murhadi (2009) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik mengenai pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap kemungkinan melakukan *fraud* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,028. Hasil tersebut artinya komite audit berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga hipotesis 3 diterima. Dengan semakin seringnya komite audit melakukan rapat, maka akan semakin baik komunikasi yang terjalin antar anggota komite audit dalam melakukan fungsi pengawasannya. Oleh karena itu, semakin banyaknya jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit, maka dapat mengurangi dan mencegah manajemen melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan dengan cara meningkatkan pengendalian dan pengawasan oleh komite audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Chtourou (2001) serta Razali dan Arshad (2014).

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik mengenai pengaruh efektivitas audit internal terhadap kemungkinan melakukan *fraud* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,032. Hasil tersebut artinya efektivitas audit internal berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga hipotesis 4 diterima. Penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2005) dan Archambeault (2002) dalam Razali dan Arshad (2014) menemukan bahwa audit internal akan memberikan keuntungan tambahan bagi suatu perusahaan karena auditor internal sudah memiliki pengetahuan tentang perusahaan tersebut. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi gejala *fraud* setiap kali ada potensi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Razali dan Arshad (2014) yang menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2012. Komite audit dan efektivitas audit internal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hal ini berarti jumlah rapat komite audit yang semakin banyak dan pengungkapan audit internal dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Sedangkan ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris independen tidak memiliki



pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hal ini berarti berapapun jumlah anggota dewan komisaris tidak berdampak pada pencegahan *fraud* dan keberadaan dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi regulasi saja.

Keterbatasan dari penelitian ini yaitu berhubungan dengan penggunaan metode *case control* yang dalam penelitian ini cenderung mendapatkan jumlah sampel yang relatif kecil karena keterbatasan data yang diberikan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, tidak semua perusahaan sampel yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mencantumkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini belum bisa berjalan secara maksimal.

Saran dari hasil penelitian untuk penelitian mendatang adalah metode *beneish m-score* dapat digunakan pada penelitian selanjutnya. Hal ini memungkinkan sampel penelitian yang lebih besar karena tidak terbatas pada data instansi tertentu, sehingga hasil analisis dari penggunaan metode *case control* dan *beneish m-score* dapat dibandingkan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang.

## REFERENSI

- Abbott, L. J., Park, Y., dan Parker, S. 2000. "The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud". *Managerial Finance*, Vol. 26, No. 11: 55-67.
- ACFE. 2012. "Report to The Nations on Occupational Fraud and Abuse – 2012 Global Fraud Study". [www.acfe.com/.../2012-report-to-nations.pdf](http://www.acfe.com/.../2012-report-to-nations.pdf), diakses 12 April 2015.
- Archambeault, S. D. 2002. "The Relation Between Corporate Governance Strength and Fraudulent Financial Reporting: Evidence from Sec Enforcement Cases". *Department of Accounting, School of Business, Albany*.
- Asian Development Bank. 1999. "Corporate Governance and Finance in East Asia. A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand" (Edited by: Ma Virginita Capulong, David Edwards, David Webb, and Juzhong Zhuang), Vol. 1 dan Vol. 2.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2008. *Fraud Auditing*. Edisi kelima. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2002. Siaran Pers Badan Pengawas Pasar Modal 27 Desember 2002. Jakarta.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2002. Bapepam-LK, SE-02/PM/2002. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2004. Kep-29/PM/2004. Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit.
- Beasley, Mark. 1996. "An Empirical Analysis Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud". *The Accounting Review*, Vol. 71, No. 4: 443-465.
- Belay, Z. 2007. A Study on Effective Implementation of Internal Audit Function to Promote Good Governance in The Public Sector.
- BPK RI. 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Cadbury Committee. 1992. *Report of The Committee on The Financial Aspects of Corporate Governance*. London: Gee.



- Chariri, A. dan Ghozali, I. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chtourou, S. M., Jean Bedard dan Lucie Courteau. 2001. "Corporate Governance and Earnings Management". *Working Paper*.
- Cressey, Donald. 1953. *The Internal Auditor as Fraud Buster*. Managerial Auditing Journal. MCB University Press.
- Dechow, P. A., R. G. Sloan, dan A. p. Sweeny. 1996. "Causes and Consequences of Earnings Manipulation : An empirical of Firms Subject to Enforcement Actions by The SEC". *Contemporary Accounting Research*, Vol. 13 (Spring):1-36.
- Effendi, M. A. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Egon Zehnder International. 2000. Corporate Governance and the Role of the Board of Directors.
- Eisenhardt, K. M. 1989. "Agency Theory: An Assesment and Review". *Academy of Management Review*, Vol. 14. No. 1: 57-74.
- El-Gammal, W., dan Showeiry, M. 2012. "Corporate Governance and Quality of Accounting Information: Case of Lebanon". *The Business Review*, Vol. 19. No. 2: 310-315.
- Emirzon, Joni. 2007. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia. Yogyakarta: Genta Press.
- Ernst dan Young. 2009. "Detecting Financial Statement Fraud", [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FIDSFIDetectingFinancialStatementFraud.pdf/\\$FILE/FIDS-FI\\_DetectingFinancialStatementFraud](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FIDSFIDetectingFinancialStatementFraud.pdf/$FILE/FIDS-FI_DetectingFinancialStatementFraud), diakses 28 Maret 2015.
- Fama, E. F. dan Jensen, M. C. 1983. "Separation of Ownership and Control". *Journal of Law and Economics*, Vol. 26.
- Forum Corporate Governance Indonesia. 2001. *Corporate Governance;Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: FCGI.
- Forum Corporate Governance Indonesia. 2002. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jakarta: FCGI.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hassan, T. 2005. Corporate Fraud - Responsibilities of The Board, Management and Auditors to Prevent and Deter Financial Crime.
- Hery. 2010. *Potret Audit Internal*. Bandung: Alfabeta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. ED PSAK No. 01 (Revisi 2009). Jakarta: Salemba Empat.



- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. 1976. "Theory of The Firm, Managerial Behaviour, Agency Costs & Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*, Vol. 3: 305-360.
- Khairandy, R. dan Malik, C. 2007. *Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Kumaat, Valery G. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Law, P. 2011. "Corporate Governance and No Fraud Occurrence in Organisations Hong Kong Evidence". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 26. No. 6: 501-518.
- Murhadi, W. R. 2009. "Studi Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Praktik Earnings Management pada Perusahaan Terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 11. No. 1: 1-10
- Nasution, M. dan Setyawan. D. 2007. "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Nguyen, K. 2008. "Financial statement Fraud: Motives, Methods, Cases and Detection". *Disertasi*, Florida.
- Perols dan Barbara. 2011. "The Relation Between Earnings Management and Financial Statement Fraud". *Advances in Accounting in International Accounting*, Vol. 27: 30-53.
- Razali, Wan Ainul A. W. M. dan R. Arshad. 2014. "Disclosure of Corporate Governance Structure and The Likelihood of Fraudulent Financial Reporting". *Accounting Research Institute*, Vol. 145: 243-253
- Richardson, Vernon J. 1998. "Information Asymmetry an Earnings Management: Some Evidence". *Working Paper*. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)., diakses 28 Maret 2015.
- Siladi, B. 2006. *The Role of Non-Executive Directors in Corporate Governance: an Evaluation*.
- Skousen, C., Smith, K. R., Wright, C. J. 2009. "Detecting and Predecting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No.99". *Journal Advances in Financial Economics*, Vol. 13: 53-81.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sutojo, Siswanto dan E. Jhon Aldridge. 2005. *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.
- Turner J. L., T. J. Mock, R. P. Srivastava. 2003. "An Analysis of the Fraud Triangle". *Working Paper*. [www.aaahq.org](http://www.aaahq.org)., diakses 4 April 2015.
- Ujiyantho. M. Arief dan Pramuka. B. Agus. 2007. "Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar
- Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108.
- Vafeas, N. 2005. "Audit Committees, Boards, and The Quality of Reported Earnings". *Contemporary Accounting Research*, Vol. 22. No. 4: 1093-1122.



Widowati, Nungki. 2009. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.